

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Jimly Ashiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidana*, Jakarta: IHC.

R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita. 1979, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bandung: Binacipta.

Riyanto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.

RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1995, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi ditengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Yogyakarta: Citra Press.

Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara.

Sujamto, 1996, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin H., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan peraturan-peraturan yang berhubungan lainnya;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah dan Penyakit Menular

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1580);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Berrsyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Jurnal

Ari Fadli, (2021). "*Mengenal Covid-19 dab Cegah Penyebarannya dengan Peduli Lindungi*", artikel pengabdian kepada Masyarakat.

Ahmad Syaifuddin. (2019), "*Tinjauan Yuridis terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online dalam Proses Pembinaan Pemasarakatan*", Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16 No. 2.

Iqraq Sulhin. (2020), "*Asimilasi Saat Pandemi Covid-19 dalam Sudut Pandang Pakar Kriminologi UP*". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 2.

Josua Hutapea, (2017). "*Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*", Lex Crimen, Vol. 4 No. 2 April.

Paham Triyoso dan Faizin Sulistio, (2021), "*Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat*", Jurnal Hukum, 2.

Usman, Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, (2019), "*Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya*", Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional, Vol. 1 No. 1.

Victorio H. Situmorang, (2019). “*Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Penegakan Hukum*”, Badan penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Vol. 13 No. 1.

D. Internet

<http://www.ditjenpas.go.id/menilik-kebijakan-asimilasi-narapidana-di-masa-pandemi-covid-19> diakses pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 01.15 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200518115201-12-504412/39-ribu-napi-bebas-lewat-asimilasi-dan-integrasi> data ini di akses pada tanggal 10 Maret 2021, pukul 18.50 WIB

<https://www.tagar.id/dampak-corona-975-napi-di-sumbar-dibebaskan> diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 23:30 WIB

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada tanggal 12 November 2021 Pukul 21.15 WIB

E. Wawancara

Wawancara Pra Penelitian dengan bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Padang, Renol, tanggal 15 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Wawancara Penelitian dengan bagian tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Padang, Renol, tanggal 5 November 2021, pukul 09.30 WIB, hlm. 43,47,52,55.

Wawancara Penelitian dengan pegawai Balai Pemasyarakatan Padang, Yosi, tanggal 10 November 2021, pukul 15.30 WIB, hlm. 11,45,49,50.